DAFTAR PUSTAKA

Annafi, R., Nugroho, A., & Putri, D. (2025). *Pajak dan retribusi daerah dalam perspektif otonomi daerah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ariffin, Z., & Sitabuana, T. H. (2022). Pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 14(2), 85–97.

Astuti, P., & Ramadhani, F. (2022). Persepsi keadilan pajak terhadap keputusan klaim Jaminan Hari Tua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 45–56.

BPJS Ketenagakerjaan. (2020). *Panduan layanan program Jaminan Hari Tua*. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.

Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Pedoman pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Effendy, M., et al. (2025). Fungsi pajak sebagai alat regulasi sosial dan ekonomi. *Jurnal Keuangan Negara*, 7(1), 33–44.

Elsa. (2020). Peran pajak dalam pembiayaan pembangunan nasional. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 101–112.

Elsa, & Rumambi, R. (2025). Analisis kebijakan pencairan Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 60–72.

Gani, A., Rahmah, N., & Putra, Y. (2022). Fungsi pajak dalam sistem keuangan negara. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 8(2), 120–130.

Hamida, S., & Wijaya, R. (2022). Sistem pemungutan pajak pusat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 6(1), 14–26.

Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2018). *Cost management: Accounting and control* (7th ed.). Boston: Cengage Learning.

Hidayat, R., & Gunawan, A. (2022). Kepatuhan wajib pajak dalam sistem *self-assessment*. *Jurnal Riset Akuntansi*, 10(3), 201–215.

Kadam, R., et al. (2025). Implementasi teknologi pembayaran nontunai (TERANO) pembayaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah*, 12(1), 55–66.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Kemenkeu RI.

Khalimi, K., & Iqbal, M. (2020). Pengantar hukum pajak Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 4(2), 98–109.

Khoirunnisa, A., & Kusuma, H. (2024). Pajak sebagai kontribusi wajib masyarakat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 77–88.

Kurniawan, A., & Putri, L. (2020). Karakteristik tarif progresif PPh Pasal 21. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, 5(2), 66–78.

Lestari, D., & Hirawati, R. (2021). Jaminan Hari Tua sebagai perlindungan sosial tenaga kerja. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 6(1), 29–41.

Mardiasmo. (2016a). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2018b). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.

Mega, A., & Agat, F. (2022). Transformasi BPJS Ketenagakerjaan dalam sistem jaminan sosial. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 140–152.

Mulyadi. (2020). *Sistem akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Nanda, R., & Ayu, S. (2025). Faktor-faktor pengambilan klaim sebagian JHT. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 13(1), 88–100.

Nur, M. (2020). Pajak penghasilan orang pribadi. *Jurnal Perpajakan Modern*, 4(1), 22–35.

Octavia, D., & Sudrajat, A. (2021). Pengenaan PPh Pasal 21 atas klaim JHT. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 9(2), 57–69.

Pratiwi, S., Lestari, N., & Rahman, F. (2024). Penggolongan pajak di Indonesia.

Rahma, A., Putri, D., & Kurniawan, B. (2025). Analisis kepatuhan wajib pajak dalam sistem *self assessment* di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 15(1), 45–58.

Samosir, R. (2021). *Perpajakan daerah dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sari, & Resdiana. (2025). Pencatatan akuntansi pada instansi publik.

Savitri, & Saifudin. (2021). Pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Shaleh, et al. (2023). Fungsi pajak dalam kebijakan publik.

Sinaga, R. (2019). Teori-teori pajak klasik dan modern. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(2), 95–108.

Siregar, A. (2021). Dampak tarif PPh terhadap perilaku wajib pajak. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(2), 120–132.

Soehamitjaja, S. (2021). *Pajak dan retribusi daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syapari, R. (2022). Implikasi akuntansi pemotongan PPh Pasal 21. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 60–73.

Tirada, D., & Walandow, S. (2023). Pajak penghasilan sebagai sumber penerimaan negara. *Jurnal Keuangan Publik*, 9(2), 85–96.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Waluyo. (2022). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wati, S., & Maulina, R. (2022). Transparansi pemotongan pajak JHT. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 7(1), 39–51.